

Pemberdayaan Kelompok Rentan Difabel Melalui Kemitraan Multipihak

Reiki Nauli Harahap dan Arnola Septa Maheswara

Prodi Pembangunan Sosial, FISIP, Universitas Tanjungpura

reikinauliharahap@gmail.com

Abstrak

Keterbelakangan, kemiskinan, dan kerentanan menjadi faktor penghambat difabel memenuhi kesejahteraannya. Campur tangan pihak ketiga dibutuhkan untuk memberikan akselerasi pemberian kehidupan yang layak bagi difabel. Negara, dunia usaha, dan kelompok masyarakat dihadapkan pada keterbatasan yang berbeda-beda pula. Sinergitas menjadi isu pokok sehingga pemberdayaan kelompok rentan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh multipihak dapat berjalan efektif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap dengan metode kualitatif dan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dipandu oleh teori konvergensi sehingga dapat dianalisis dan dipertajam isu yang dibahas dalam tulisan ini, dengan demikian didapat informasi bahwa dalam aktivitas kemitraan multipihak dibutuhkan beberapa *catalyst* sebagai faktor pemicu, dan dilanjut dengan *mutual agreement* serta *collective action* sehingga hal yang dituju dapat tercapai. Program pelatihan pijat fisioterapi menjadi contoh *best practice* dalam agenda kemitraan multipihak untuk melaksanakan program pemberdayaan kelompok rentan difabel. Penciptaan akses kesejahteraan bagi difabel harus melibatkan banyak pihak. Pertuni (CSO) berperan sebagai pilar utama penggerak perubahan dan pemberdayaan, PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant (*Private sector*) sebagai aktor pendukung dan pemerintah Kabupaten Cilacap (*state*) sebagai aktor yang melakukan kontrol melalui perumusan kebijakan sosial. Terdapat enam *catalyst* yang menjadi faktor pemicu pemberdayaan difabel oleh ketiga pihak tersebut diantaranya *internal stimulus*, *change agent*, *innovation*, *technology*, *policy*, dan *mass media*.

Keywords: *Kemitraan, Multipihak, Difabel, Pemberdayaan*

Abstract

Underdevelopment, poverty and vulnerability become factors inhibiting disability from fulfilling their well-being. Third-party intervention is needed to accelerate the provision of a decent life for people with disabilities. Government, businesses, and community groups are faced with different limitations. Synergy becomes the main issue so that the empowerment of vulnerable groups through programs that carried out by multi-parties can run effectively. This research was conducted in Kabupaten Cilacap with qualitative methods and descriptive analysis approaches. This research is guided by convergence theory so that the author can analyze and sharpen the issues that discussed in this paper, so that information is obtained that in an activity multi-stakeholders partnership requires several catalysts as trigger factors and continued with mutual agreement and collective action so that the intended thing can be achieved. Physiotherapy massage training program is an example of best practice in the multi-party partnership agenda to implement the empowerment program of vulnerable groups with disabilities. The creation of welfare for difabel must involve many parties, Pertuni (CSO) stand-in as the main pillars driving change and empowerment, PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant (Private sector) as a supporting actor and the Cilacap Regency Government (state) as an actor who exercises control through the formulation of social policies. There are six catalysts that trigger disability empowerment by the three parties including internal stimulus, change agent, innovation, technology, policy and mass media.

Keywords: *Partnership, Multiparty, Disabled, Empowerment*

Pendahuluan

Difabel merupakan akronim dari kata *Different Ability People*. Ada bermacam kategori difabilitas, di antaranya tuna netra, tuna pendengaran, tuna wicara, tuna daksa, serta tuna grahita (Yulianto, 2014). Tiap-tiap difabilitas mempunyai derajat keterampilan serta kebutuhan yang berbeda-beda. Meskipun demikian hal yang utama adalah pemenuhan hak difabel terhadap aksesibilitas non-fisik dalam bentuk penerimaan serta “pengakuan” selaku bagian dari warga yang mempunyai kedudukan, hak, serta tanggungjawab sebagaimana manusia “wajar” pada umumnya.

Keterbatasan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, LSM, dan pemerintah, bukti nyata kelemahan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah (negara) adalah pelaku utama yang bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan dan kerentanan, namun dalam proses pelaksanaannya pemerintah harus mampu menjadi pemimpin bagi pemangku kepentingan lainnya untuk mensinergikan program percepatan pengentasan kemiskinan dan kerentanan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih

antara kegiatan lembaga penyedia kesejahteraan, organisasi masyarakat sipil, serta dunia usaha, melalui tanggung jawab sosial perusahaan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyentuh masyarakat hingga ke akar-rumput.

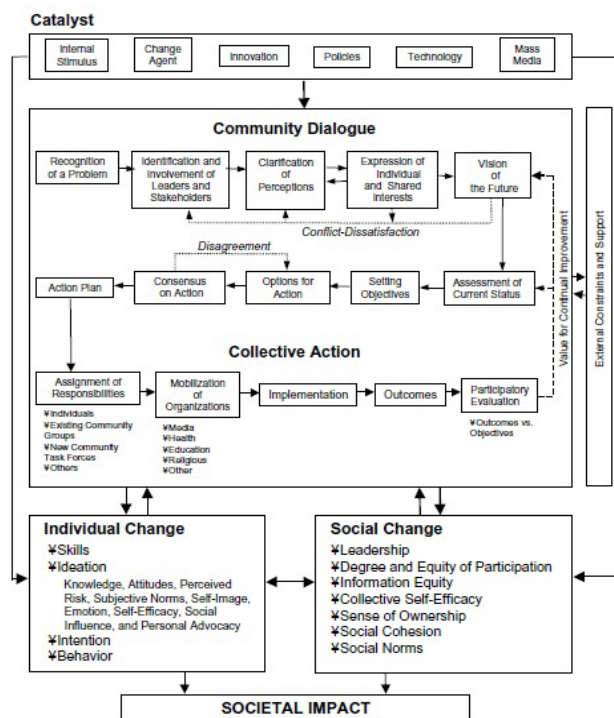
Kondisi masyarakat yang ramah terhadap difabel tidak dapat diciptakan oleh salah satu pihak saja. Program rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dihadapkan pada keterbatasan pendanaan, kelompok masyarakat hanya memiliki modal sosial, dunia usaha memiliki tujuan utama yang lebih mendesak yaitu pencapaian keuntungan. Sehingga perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut menjadi isu utama yang menarik untuk dibahas. Selain itu, selama ini negara sebagai aktor utama selalu menggunakan pendekatan *top down* dan menjadikan pemangku kepentingan lainnya sebagai objek dari program dan aktivitas yang dijalankan (Akhirianto, 2019). Oleh karena demikian dibutuhkan paradigma dan pola kemitraan baru bagi negara, pihak perusahaan dan masyarakat.

Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena ketersediaan *best practice* kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Hal tersebut tergambarkan melalui salah satu program CSR perusahaan semen di Kabupaten Cilacap. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant yang menggandeng berbagai pihak untuk melaksanakan program pemberdayaan difabel tuna netra sebagai upaya percepatan mewujudkan masyarakat yang inklusif. Tindakan PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant ini termasuk dalam model atau pola penerapan CSR bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah,

universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya, karena kuncinya adalah kerjasama antar pihak (Tri Winarni, 2012). Hal tersebut terjadi pada sistem terbuka yang dikembangkan oleh pemerintah setempat, dan kemudian harus diikuti dengan swasta dan masyarakat untuk mengembangkan sistem yang terbuka pula (Krisdyatmiko, 2012). UU No. 40 Tahun 2007 dan ISO 26000 menjadi landasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant.

Gambar 1. Tahapan Pencapaian Konvergensi



Figueras and Kincaid, 6/2001

Sumber: Lawrence Kincaid, dkk 2002

Lawrance Kincaid pernah menulis artikel berjudul *The Integrated Model of Communication for Sosial Change* dan mengembangkan suatu teori perihal pentingnya “*community dialogue*” dan “*collective action*”. Komunikasi dan aksi kolektif akan menciptakan sebuah iklim yang mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya (Kincaid, 2002). Perwujudan masyarakat inklusif sebagai sebuah perubahan sosial dapat dicontohkan dalam hal keberlanjutan suatu program yang kebermanfaatannya diterima oleh kelompok rentan.

Konsensus dan kesepakatan bersama tersebut dapat dicapai dengan beberapa tahapan, misalnya melalui forum-forum yang melibatkan berbagai aktor untuk membangun jaringan antar aktor dan lebih tepatnya disebut modal sosial. Organisasi, modal sosial pada tingkat ini menunjukkan pengenalan, kerjasama, saling percaya, solidaritas, loyalitas, reputasi, kemudahan mendapatkan informasi, dan modal yang berhubungan dengan manusia, atau mencakup hubungan dengan orang lain, pengembangan individu dan pengembangan diri (Alfitri, 2011). Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan sebelum

menganalisis sebuah fenomena menggunakan pisau teori konvergensi sebagaimana tergambar pada gambar 1. diantaranya: *catalyst*, kemudian *community dialogue (mutual understanding dan mutual agreement)*, dan terakhir yaitu *collective action* sehingga kemudian lahirlah perubahan sosial, yang mana dalam penelitian ini dimaknai dengan perwujudan masyarakat inklusif (Kincaid, 2002).

Catalyst (katalis) merupakan sebuah unsur atau zat yang berfungsi untuk mempercepat suatu proses kimiawi. Dengan demikian katalis menurut teori konvergensi adalah berbagai aspek pendukung atau faktor perangsang terjadinya percepatan sebuah perubahan sosial yang bersumber dari internal dan eksternal. Katalis dapat memberikan kesempatan kepada aktor untuk memetakan berbagai hal yang mendukung perubahan sosial, sehingga dapat diketahui persentase kemungkinan perubahan sosial tersebut dapat terjadi. Beberapa katalis yang dikemukakan oleh Lawrance Kincaid adalah *internal stimulus, change agent, innovation, policies, technology, mass media*.

Proses selanjutnya terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu

community dialogue, tentang pentingnya komunikasi dengan tujuan untuk mencapai konsensus bersama. Menurut North (1994) kata “sepakat” atau konsensus antar pihak yang berbeda, baik yang bersifat formal ataupun non-formal dapat akan terwujud dengan membangun komunikasi (Lashqari, 2004). Komunikasi antar grup atau komunitas sangat penting dengan menentukan area kesepahaman dan yang tidak disepakati bersama. Komunikasi hadir untuk meminimalisir perbedaan ke level paling dasar (konvergensi) di mana terdapat *mutual understanding* dan *agreement to engage in collective action and solve the mutual* (Kincaid, 2002).

Tahapan selanjutnya adalah *Collective Action*. Tahapan *collective action* ini memberikan kesempatan berbagai *stakeholder* untuk bekerjasama mewujudkan suatu *common goal*. Meskipun dengan latar belakang dan maksud yang berbeda-beda, oleh karena itu bila dilihat dari sudut pandang PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai sebuah entitas bisnis, pelibatan pihak eksternal ke dalam kegiatan perusahaan dapat digolongkan dalam kategori *representatif of contextual stakeholder*. Istilah tersebut meminjam dari hasil penelitian Silvia Ayuso dan

Antonio Argandona (2007) bahwa salah satu kategori pihak yang dibutuhkan perusahaan untuk mewujudkan *good corporate governance* terutama dalam praktik tanggung jawab sosial adalah *representatif of contextual stakeholder*. *contextual stakeholder* adalah pihak non-bisnis dengan prioritas keterlibatan mengacu pada isu, permasalahan, dan ide-ide, dan hal tersebut hanya dapat terwujud dengan *communication to community* (Ayuso: 2015) dan kemudian hal tersebut digambarkan oleh Lawrence Kincaid sebagai *community dialogue*.

Setelah semua tahapan tersebut dilaksanakan maka selanjutnya akan terwujudlah perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu perubahan sosial individu dan perubahan sosial kelompok (Kincaid, 2002). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pola kemitraan dan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak dari keberhasilan pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif (*descriptive-interpretative*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna dari setiap perilaku atau fenomena yang terjadi di dalam dinamika pemberdayaan masyarakat kelompok rentan difabel (tuna netra) oleh PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant. Melihat bagaimana *stakeholders'* saling mempengaruhi dan melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan pembagian peran yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian yang mengadopsi teknik pemilihan informan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi, serta diskusi dan refrensi. Validitas atau teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui proses triangulasi serta diskusi. Menurut Miles dan Huberman (1992) bahwasanya terdapat tiga tahapan proses analisis data, di antaranya tahap pertama yaitu reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Sektor publik identik dengan kewajiban negara memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sektor bisnis salah satunya identik dengan dorongan kuat praktik tanggungjawab sosial perusahaan, serta sektor masyarakat sipil identik dengan *voluntary sector*, *mutual aid*, dan *informal sector* (Krisdyatmiko, 2012). Pelaksanaan program pelatihan pijat yang di inisiasi oleh PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant, Pertuni, dan Stikes Al Irsyad Al Islamiyyah merupakan salah satu bentuk upaya pembangunan masyarakat kepada kelompok rentan. Soetomo (2010) mengatakan bahwa proses menuju kondisi yang lebih baik tersebut sering melibatkan berbagai pihak, menggunakan berbagai pendekatan dan strategi serta memanfaatkan berbagai sumber daya Menurut Kincaid (2002) untuk mewujudkan sebuah perubahan sosial (dalam hal ini masyarakat inklusif) terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung percepatan perwujudan perubahan sosial tersebut.

1) *Internal Stimulus*

Internal stimulus adalah faktor yang paling dominan untuk mewujudkan

sebuah perubahan. Ditemukan bahwa diskriminasi dan keprihatinan yang dialami difabel tuna netra selama berkehidupan bermasyarakat merupakan "*internal stimulus*" yang mendesak difabel untuk melaksanakan suatu perubahan. Permasalahan ini memang tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki difabel. Hal tersebut menggiring difabel untuk meningkatkan kualitas diri melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan mengikuti kegiatan pemberdayaan tuna netra melalui pelatihan pijat fisioterapi serta klinik pijat.

Kotler (dalam Zaltman, 1972) berpendapat bahwa *cause* adalah faktor yang menyebabkan dilakukannya tindakan untuk mewujudkan perubahan dan perbaikan. Faktor ini tidak lain merupakan kondisi yang diidentifikasi sebagai masalah sosial (Soetomo, 2010). Kondisi yang memerlukan perubahan tersebut dapat berasal dari warga masyarakat yang menjadi penyandang masalah maupun dari kondisi sistem dan institusi sosial yang kurang berjalan sebagaimana diharapkan. Dari pemikiran Soetomo dan Lawrence Kincaid tersebut diperoleh pemahaman bahwa perubahan sosial (perwujudan masyarakat inklusif) harus dilakukan demi kondisi yang

lebih baik bagi difabel. Difabel (tuna netra) telah mampu mengidentifikasi permasalahan yang menghadapinya seperti kurangnya penerimaan masyarakat terhadap difabel. Kemudian perubahan tersebut dapat tercapai dengan dua cara yaitu memperbaiki penyandang masalah (*individual blame approach*) dan memperbaiki sistem (*system blame approach*).

2) *Change Agent*

Katalis "*change agent*" adalah "motor" penggerak perubahan sosial yang akan dituju, dapat berbentuk individu ataupun kelompok. Menurut Kotler *change agency* merupakan organisasi baik dalam lingkungan masyarakat sendiri maupun berasal dari luar yang bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi terjadinya perubahan (Soetomo, 2010). *Change agent* memiliki dua fungsi yaitu sebagai "inisiator" dan perencana dan bersifat mengarahkan, kedua bersifat "persuasif" di mana perubahan berasal dari masyarakat dan *change agent* hanya sebagai "fasilitator". Hasil penelitian ditemukan bahwa perubahan sosial lebih dominan berasal dari masyarakat, yaitu anggota-anggota Pertuni yang merasakan dampak diskriminasi secara langsung,

institusi Pertuni hanya menjadi fasilitator yang kemudian menghubungkannya dengan berbagai pihak. Namun apabila diambil sudut pandang yang lebih luas dengan menggunakan pemikiran Kotler tersebut Pertuni dapat dikatakan sebagai *Change Agency* yang bersifat inisiator terjadinya perubahan, di mana ide-ide cukup banyak berasal dari Pertuni, sedangkan PT. Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant dan Stikes Al-Irsyad Al Islamiyyah hanya sebagai fasilitator yang memberikan bantuan pendanaan dan juga tenaga ahli pengajar di bidang fisioterapi.

3) *Innovation*

Dari hasil studi yang dilakukan, ditemukan bahwa upaya pemerintah merekomendasikan beberapa sekolah untuk menerapkan pendidikan inklusif menjadi langkah yang cukup berdampak pada perwujudan masyarakat inklusif. Upaya menyatukan dua dunia berbeda antara difabel dan orang normal dapat dilakukan sedini mungkin, sehingga timbulnya konflik dapat diminimalisir, dan harapannya masyarakat inklusif dapat terwujud.

4) *Technology*

Menurut Lawrance Kincaid teknologi bersifat teknis dan merupakan jawaban pemecahan dari suatu permasalahan. Banyak lembaga kemanusiaan yang memiliki perhatian terhadap kondisi difabel dan menawarkan berbagai aktivitas mulai dari yang berbasis pemberdayaan seperti pelatihan dan peningkatan skill ataupun yang berbentuk advokasi hak-hak difabilitas, serta yang paling umum dijumpai yaitu lembaga *charity* yang memberikan santunan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap berupaya memberikan bantuan akses kesejahteraan kepada difabel. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng banyak pihak, baik dari internal pemerintah maupun pihak-pihak luar yang dapat membantu. Salah satu kegiatan pendayagunaan difabel dari pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu melalui pemberian alat bantu langsung kepada perorangan, seperti kaki palsu, alat bantu dengar, dan kursi roda. Hal tersebut merupakan program yang bertujuan sebagai bentuk upaya memberikan pelayanan kepada penyandang difabel. Bantuan dari pihak ketiga, misalnya UCP berupa bantuan kursi roda adaptif sejumlah 250 unit,

kemudian bantuan dari Yayasan Kasih Tuna Daksa Jakarta berupa kaki dan tangan palsu, selain itu terkait bibir sumbing pemerintah bekerjasama dengan Rumah Sakit Permata Sari di Semarang untuk memberikan operasi gratis bagi penderita bibir sumbing. Upaya pemerintah menggandeng pihak ketiga disebabkan karena keterbatasan pemerintah dalam melakukan banyak program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat.

5) *Policy*

Kebijakan dari pemerintah merupakan aturan paling dasar yang dapat dijadikan pedoman bagi berbagai pihak untuk mewujudkan masyarakat inklusif. Kebijakan tersebut akan berdampak pada berbagai hal diantaranya program-program yang di targetkan kepada difabel, karena menurut Soetomo (2010) salah satu bentuk rumusan tindakan negara untuk memecahkan masalah sosial adalah dengan kebijakan sosial. Menurut Kotler *policy* dapat dikategorikan sebagai *power strategy*. *Power strategy* adalah strategi perubahan yang mengandalkan dukungan kekuasaan, otoritas, dan kemampuan pendanaan dari *change agency* (Soetomo, 2010). Masing-

masing aktor mengambil bagian sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant mendukung perwujudan masyarakat inklusif melalui sisi pendanaan yaitu dalam bentuk program pelatihan pijat bagi difabel dengan tujuan meningkatkan kapasitas difabel kemudian dilanjutkan dengan penyediaan fasilitas klinik pijat.

6) *Mass Media*

Media masa merupakan salah satu agen perubahan terbaik di era informasi. Media massa dapat melakukan penyebarluasan pengaruh kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan sumber daya yang baik bila digunakan secara tepat (Kincaid, 2002). Kotler berpendapat bahwa salah satu bagian dari *change strategy* ialah *re-educative strategy*. *Reeducative* yang merupakan proses edukasi kembali dan upaya mendorong perubahan yang dilakukan dengan memodifikasi kepercayaan atau keyakinan dan nilai (Soetomo, 2010), dan hal tersebut dapat dilakukan oleh media masa misalnya dengan menampilkan figur difabel yang inspiratif dan mandiri.

Informasi dan pemahaman bersama menjadi dua komponen yang paling dominan dari komunikasi model

konvergensi. Semua diawali dari masing-masing pihak untuk mengerti dan paham apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya. Pertuni menyadari bahwa pendanaan merupakan salah satu masalah yang besar dikarenakan sifat keanggotaan pada lembaga tersebut adalah kesukarelawanan. Kelebihan Pertuni adalah kemampuan mengorganisir anggota dengan mengandalkan *sense of belonging* anggota kepada Pertuni sebagai sebuah lembaga yang sudah lama terbentuk sebelum Pertuni Kabupaten Cilacap resmi secara administratif seperti saat ini.

Selanjutnya PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai sebuah entitas bisnis unggul dalam hal sumber daya keuangan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk dana pengembangan masyarakat atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas difabel melalui program pelatihan pijat. Stikes Al-Irsyad Al Islamiyyah berperan sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kapasitas difabel melalui program studi fisioterapi, akan tetapi lemah dalam hal pendanaan. Keterlibatan Stikes Al-

Irsyad al Islamiyyah dalam program tersebut hanya sebatas pengabdian kepada masyarakat. Setelah masing-masing pihak memahami kelemahan dan kelebihannya, kemudian di bangunlah *mutual understanding*. Menurut Monge dkk, jaringan berisi kelompok-kelompok yang terhubung oleh komunikasi yang saling mengikat, tali pengikatnya adalah kesamaan visi, misi, dan tujuan. Jaringan ada karena informasi yang tersampaikan antara individu-individu dari satu kelompok kepada kelompok lain (Krisdyatmiko, 2012).

Tahapan berikutnya adalah *mutual agreement*. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan tahapan ini dalam waktu singkat. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk berkomitmen bersama-sama terlibat dalam suatu kegiatan pengembangan masyarakat. Piere Bourdieu (1986) berpendapat bahwa untuk memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial sangat penting dipelajari aspek modal dalam segala bentuknya. Modal tidak sebatas seperti dikaji teori ekonomi. Bordieu menegaskan bahwa modal dalam artian tertentu juga tidak kalah nilainya secara ekonomis dengan modal ekonomis. Menurutnya, memaknai modal sosial

sebagai keseluruhan sumber daya, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada rasa saling kenal dan saling mengakui (Alfitri: 2011). Melalui kerjasama multipihak diperoleh berbagai bentuk modal diantaranya modal ekonomi yang dimiliki oleh PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant, kemudian modal sosial yang dimiliki oleh Pertuni. Pada Tahap *mutual agreement* ini modal sosial menjadi suatu keharusan sebelum lanjut ke tahap *collective action*.

Menurut Bourdieu modal utama *mutual agreement* adalah “kepercayaan” yang terbentuk melalui saling kenal, saling mengakui, dan tentunya saling membutuhkan. Lebih lanjut Fukuyama (2002) berpendapat bahwa komunitas bergantung pada kepercayaan dan kepercayaan ditentukan secara kultural, maka komunitas secara spontan akan muncul dalam berbagai tingkatan yang berbeda dalam budaya yang berbeda pula. Kepercayaan adalah pengharapan yang muncul dalam sebuah komunitas yang berperilaku normal, jujur, dan kooperatif berdasarkan norma yang dibentuk bersama demi kepentingan anggota yang lain dari komunitas itu.

Kepercayaan adalah unsur utama dalam pengertian atau konsep modal sosial. Kepercayaan juga dapat mendorong seseorang bersedia menggunakan hasil kerja orang atau kelompok lain (Alfitri, 2011).

Collective action menjadi tahap lanjutan setelah *mutual agreement*. Pada tahap ini program mulai dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan kesepakatan sebelumnya. Masing-masing pihak melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai entitas bisnis yang memiliki modal ekonomi berperan sebagai penyokong pendanaan. Pertuni sebagai penerima manfaat program dan sekaligus sebagai aktor yang mengorganisir kelompok rentan difabel. Stikes Al-Irsyad sebagai lembaga akademis yang mampu menjadi fasilitator pelatihan untuk peningkatan kapasitas difabel tuna netra.

Suatu komitmen untuk perubahan sosial akan terjadi dengan dorongan beberapa faktor di antaranya: *internal stimulus, change agent, innovation, policies, technology* dan *mass media*, namun sebelum itu perlu diketahui bersama bahwa faktor-faktor tersebut

bersifat pilihan, artinya perubahan sosial mungkin terjadi karena satu atau dua faktor saja. Menurut Lawrance Kincaid (2002) faktor-faktor tersebut merupakan sedikit dari banyak faktor yang mempengaruhi komunikasi konvergensi individu atau kelompok. Banyak literatur yang membahas bahwa pemecahan suatu masalah dimulai dari “identifikasi masalah”, namun hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana suatu fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang membutuhkan pemecahan masalah. *Internal stimulus* dan *change agent* menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi peran dan keterlibatan antar pihak untuk melakukan perubahan sosial. Dapat disimpulkan bahwa ketiga aktor tersebut merupakan suatu komponen yang penting dan saling terhubung satu sama lain. Pertuni hadir sebagai *change agent* mengajak pihak lain untuk melakukan perubahan sosial, dan sejalan dengan teori Lawrance bahwa biasanya *change agent* memang berasal dari NGO (*Non-Government Organization*).

Faktor selanjutnya yaitu *internal stimulus*. Dapat dipahami dari latar belakang ketiga aktor tersebut. Stikes Al-

Irsyad Al Islamiyyah terlibat disebabkan program tersebut adalah kegiatan pengabdian masyarakat. PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant selain dilatarbelakangi oleh kepercayaan yang telah terbentuk, kegiatan PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant menyasar kepada kelompok rentan difabel juga disebabkan PT Holcim Indonesia Tbk Cilacap Plant merasa kelompok difabel memiliki hak dan lebih membutuhkan untuk menerima program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari perusahaan. Pertuni sebagai lembaga yang menginisiasi tentu memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas diri terutama kualitas anggotanya dengan membangun akses kesejahteraan tersebut sebagaimana termaktub dalam visi dan misi Pertuni.

Simpulan

Penciptaan akses kesejahteraan bagi difabel dengan melibatkan banyak *stakeholder* merupakan sebuah pencapaian yang sangat besar untuk sebuah organisasi difabilitas selevel Pertuni. Semangat Pertuni untuk meningkatkan kualitas diri anggotanya dengan mengorganisir banyak potensi dan modal dapat menjadi suatu bentuk

bahwa perubahan sosial dapat terwujud apabila diawali oleh aktor yang membutuhkan, baik yang berasal dari *civil society*, *private sector*, ataupun *state*.

Pemerintah sebagai *controlling actor* seharusnya memperkuat perannya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro-difabel, perumusan kebijakan tersebut juga harus melibatkan difabel. Media masa juga memiliki peran yang cukup penting untuk membumikan gerakan peduli difabel dan menggeser sudut pandang masyarakat terhadap difabel. Pertuni menjalankan peran advokasinya sebagai NGO melalui kerjasama ke berbagai pihak. Pertuni telah menjadi *safety net* bagi difabel tuna netra. Langkah Pertuni mengadvokasi hak dan kebutuhan difabel dapat dijadikan salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan *bottom-up* yang berhasil. Secara umum penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam faktor "*catalyst*" yang mendukung keberhasilan pola kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat di antaranya *internal stimulus*, *change agent*, *innovation*, *technology*, *policy*, dan *mass media*. Berbagai *catalyst* tersebut kemudian

bekerja dengan baik melalui *mutual agreement* dan *collective action* yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap (*state*), PT. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant (*private sector*), dan Persatuan Tuna Netra Indonesia Kabupaten Cilacap (*civil society*).

Daftar Pustaka

- Akhirianto, N. A. (2019). Konsep Desain Pengurangan Risiko Bencana Longsor Berbasis Komunitas. *Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana*, 12 (1), 32-34. <https://doi.org/10.29122/jstmb.v12i1.3689>
- Alfitri. 2011. *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm 63.
- Ayuso, Silvia. Antonio Argandona. "Responsible Corporate Governance: Towards A Stakeholder Board of Directors?". <http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0701-E.pdf> tanggal 16 November 2015 Pukul 22:00.
- Kincaid, Lawrance. Maria Elena Figueroa. Manju Rani. Gary Lewis. 2002. *Communication for Social Change: An Integrated Model for Measuring the Process and Its Outcomes*. The Rockefeller Foundation. New York. <http://>

- archive.cfsc.org/pdf/socialchange.pdf
- Krisdiyatmiko. 2012. “Kemitraan Pemerintah-Swasta-Masyarakat dalam bingkai forum *Multistakeholder Corporate Social Responsibility (MSH-CSR)*”. Dalam Susestawan, dkk. (eds), *Corporate social Responsibility: Komitment Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Azzagrafika.
- Lashqari, Malek. 2004. “Corporate Governance: Theory and Practice”. tanggal 16 November 2015 Pukul 20:00 <http://tharcisio.com.br/arquivos/textos/13200724.pdf>
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang metode-metode baru*. Diterjemahkan oleh Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta.: Universitas Indonesia Press.
- Soetomo. 2010. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Winarni, Tri. 2012. “Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam upaya Penanganan Lanjut Usia: Sebuah Alternatif”. Dalam Susestawan, dkk. (eds), *Corporate Social Responsibility: Komitment untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Yulianto, Mohammad Joni. 2014. “Terminologi: Difable atau Penyandang Disabilitas”. Dalam M. Syafie, dkk. (eds). *Potret Difabel berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: Sasana Integrasi dan Advokasi difabel, hlm. 1-18.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

ISO 26000:2010 *Guidance on Social Responsibility*